PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Sawahlunto, Januari 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG 1
2. LANDASAN HUKUM 2
3. RUANG LINGKUP 2
4. FORMAT PERJANJIAN KINERJA 3
5. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II. ORGANISASI

1. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 6
2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN 10

BAB III. RENCANA STRATEGIS DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

1. RENCANA STRATEGIS / RENSTRA 14
2. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RENJA) 24

BAB IV. PERJANJIAN KINERJA 28

BAB V. PENUTUP

1. KESIMPULAN 29
2. SARAN 29

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SKPD (Anak Lampiran IA1/2-6)
- TABEL PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2018 (Anak Lampiran I/5-6)
- TABEL DAFTAR LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 (PERUBAHAN)
- STRUKTUR BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perjaian Kinerja merupakan tekad dan janji yang berisi Rencana Tahunan yang akan dicapai oleh pemegang jabatan setruktural di setiap Organisasi Perangkat Daerah, dalam wujud program dan kegiatan yang bersifat strategis dan prioritas.

Penetapan Perjanjian Kinerja disebabkan adanya program/kegiatan dan anggaraan pada DPA OPD Badan Kesbangpol PBD, sehingga dengan demikian Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus direalisasikan oleh pemegang jabatan sebagai penerima amanah dan dijadikan sebagai dasar Evaluasi dan Penilaian Pencapaian Kinerja.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Penetapan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 ini kami mengucapkan terima kasih.

Sawahlunto, Januari 2021

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN, S.Sos, MM
NIP. 19700812 190003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menegaskan bahwa Penyusunan Perjanjian Kinerja harus dibuat oleh seluruh tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dirasa perlu dibahas dan dicarikan solusinya adalah bagaimana kita melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas kinerja, baik secara kelembagaan maupun kinerja personil beserta seluruh jajaran birokrasi yang mendukungnya. Diperlukan parameter ukuran yang akan dipergunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi, serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara Kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran Kinerja ini dilakukan secara berkala (Triwulan) dan Tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021, sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pimpinan Unit Kerja yang menerima tanggung jawab tersebut. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat struktural.

2. LANDASAN HUKUM

Beberapa Peraturan Perundangan yang menjadi Landasan Hukum dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang tersedia, dinamika masyarakat dan kondisi lingkungan. Ruang lingkup Perjanjian Kinerja ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama yang merupakan Program Prioritas yaitu program program yang dapat menggambarkan skala prioritas dari tugas dan urusan wajib yang menggambarkan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dan isu strategis yang sedang berkembang.

Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja ini antara lain :

1. Intensifikasi pencegahan korupsi
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja aparatur
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan sanksi terhadap aparatur

4. FORMAT PERJANJIAN KINERJA

Format Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

   Merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.

2. Lampiran berisi antara lain :
   a. Sasaran strategis

      Merupakan pernyataan strategis SKPD sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis OPD

   b. Indikator Kinerja

      Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan dan pencapaian hasil suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa input, output, outcome, maupun benefit yang dapat dicapai.

   c. Target Kinerja

      Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun tertentu.

d. Program-program

Program-program yang menggambarkan keberadaan (eksistensi) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto. Perumusan program utama ini memperhatikan program-program yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, jika dipandang perlu, maka dimungkinkan setiap unit kerja untuk merumuskan sub program tersendiri.

e. Kegiatan – kegiatan

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan merupakan rincian Program yang diuraikan berdasarkan kebutuhan tugas dan hal – hal yang sifatnya strategis dan prioritas untuk dilaksanakan guna menindaklanjuti Rencana Strategis yang telah disusun.

f. Jumlah Anggaran yang dialokasikan

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut, data ini didasarkan pada dokumen anggaran yang telah disetujui.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, ruang lingkup, format perjanjian kinerja dan sistematika penulisan

BAB II. ORGANISASI

Menjelaskan secara ringkas kedudukan dan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi

BAB III. RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KERJA

Berisikan Strategik OPD 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

BAB IV. PERJANJIAN KINERJA

Berisikan pernyataan dan tabel perjanjian kinerja yang berisikan program utama, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja serta jumlah anggaran dialokasikan

BAB V. PENUTUP

Terdiri atas kesimpulan dan saran dari uraian – uraian dalam bab – bab sebelumnya.

BAB II
ORGANISASI

1. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan Organisasi Pelaksana dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Sekretaris membawahi:
   a. Sub bagian Administrasi Umum
   b. Sub bagian Program dan Pelaporan
   c. Sub bagian Administrasi Keuangan
4. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik membawahi:
   a. Sub bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Masyarakat, dan
   b. Sub bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga
5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik membawahi:
   a. Sub bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan
   b. Sub bidang kedaruratan dan logistik
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
   a. Sub bidang Rehabilitasi
   b. Sub bidang Rekonstruksi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.

SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto keadaan tanggal 09 Januari 2020 adalah sebanyak 66 orang. Aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto menurut golongan dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Komposisi Sumber Daya Aparatur Badan Kesbangpol dan PBD Tahun 2021

Oktober 2020 sebagai Pembanding

NO	Uraian	Keadaan Per Oktober 2020			Keadaan Per Januari 2021			Bertambah/berkurang		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan:									
	Gol IV	3	1	4	3	1	4	0	0	0
	Gol III	10	4	14	10	5	15	0	1	1
	Gol II	7	2	9	7	2	9	0	0	0
	Gol I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PTT Wako	5	4	9	6	4	10	1	0	1
	PTT Kaban	26	2	28	29	3	32	3	1	4
	Jumlah	51	13	**64**	55	15	**70**	4	2	**6**

2.	Jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan aparatur :									
	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S2	1	1	2	1	1	2	0	0	0
	S1	14	7	21	14	8	22	0	1	1
	DIV	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	DIII	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	SLTA	32	4	36	36	5	41	4	1	5
	SLTP	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	51	13	**64**	55	15	**70**	4	2	**6**

Bila dilihat dari jumlah Sumber Daya Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto pada kondisi 04 Januari 2021 terdapat perubahan komposisi Pegawai menurut golongan maupun tingkat pendidikan, hal ini disebabkan karena adanya CPNS baru, PNS yang meninggal, pindah, pegawai yang naik golongan dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka ketentuan pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan dibagi atas urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan kongkuren dan urusan pemerintahan umum.

Tugas yang terkait dengan Kesatuan Bangsa, Politik merupakan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dijelaskan pasal 25. Pada pasal 9 ayat (5) disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, dimana untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum dimaksud dijelaskan pada pasal 25 ayat (2), ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/walikota diwilayah kerja masing-masing dibantu oleh instansi vertikal. Untuk pembiayaan pemerintahan umum dibiayai oleh APBN ayat (5). Sementara ini sampai ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dikeluarkan , maka tugas Kesatuan bangsa dan Politik dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada pasal 122 yaitu :

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

2. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sementara tugas yang terkait dengan tugas dibidang kebencanaan dijelaskan dalam pasal 117 yang berbunyi "Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penanggulangan bencana.

Untuk Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilingkungan Pemerintahan Kota Sawahlunto ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam implementasi pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sama halnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016 diatur dalam pasal 12 dan 13 .

- Pada pasal 12 dinyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan . Dan untuk Anggaran Penyelenggaraan urusaan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada APBD.

- Pada pasal 13 dinyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana maka dibentuklah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, terakhir diruBah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Perda dimaksud telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol dan PBD, dimana tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana adalah :

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
4. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menyusun , menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

7. Melaporkan penyenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang;

9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan, kebijakan teknis dibidang Ideologi, kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dan pembinaan masyarakat ;

2. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penaggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Pemerintah telah menetapkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyusunan RPJMD ini, Pemerintah Kota Sawahlunto berpedoman pada landasan Idiil yaitu Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Sawahlunto.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto merupakan dokumen pelaksanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang berisikan kondisi dan permasalahan, sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan umum, program dan rencana kerja menurut agenda dan rencana pembangunan daerah yang merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto adalah bersifat makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daeran selama 5 tahun. RPJMD Kota Sawahlunto disusun untuk periode waktu tahun 2018 sampai dengan 2023.

Pembangunan di Kota Sawahlunto pada Tahun 2018 s/d 2023 akan diprioritaskan pada peningkatan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik,pengembangan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui industri kepariwisataan berbasis kegiatan industri kreatif, inovatif dan mengadakan pelatihan melalui BLK dan mewujudkan pendikan yang berkualitas untuk meghasilkan Sumber Daya Manusia beriman,kreatif dan berdaya saing.

Pemerintah Daerah bertekad untuk melanjutkan pembangunan dibidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memupuk kehidupan yang religius serta membenahi pelayanan publik yang lebih baik oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah ditujukan untuk pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah, menyiapkan sarana dan prasarana BLK yang berkualitas sesuai standar, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan ketrampilan calon tenaga kerja , mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, memfasilitasi pembiayaan UMK diberbagai sektor potensial , memmantapkan penataan pasar tradisional dan menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional.

Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Dimana *Visi RPJMD* adalah :

" DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF,INOVATIF,UNGGUL,BERMARTABAT,BERKEADILAN DAN SEJAHTERA ".

Misi untuk mewujudkan Visi RPJMD adalah :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan Beasiswa dan Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
6. Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjuta.

7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas ,gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.
9. Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor.

Selanjutnya untuk melaksanakan Visi dan Misi dan menangani isu strategis yang dihadapi dirumuskan tujuan dan tujuan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dengan indikator-indikator sasaran yang mempunyai tolak ukur. Dalam mencapai Misi RPJMD yang lebih memperjelas capaian-capaian SKPD yang dapat dilihat pada Matrik Hirarki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto.

Dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023, dapat ditelaah ' Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terumuskan dalam Tujuan Pembangunan yang diterjemahkan pada Misi ke-7 dengan Tujuan Pembangunan dan sasaran dengan tolak ukur dalam indikator sasaran dan strategi yaitu :

- Rumusan untuk tugas Penanggulangan Kebencanaan terletak pada :

Misi 7	:	Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai
Tujuan	:	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan
Sasaran	:	Meningkatnya kesiapsiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	1. Persentase Jumlah Korban yang terselamatkan 2. Persentase Jumlah Fasum rusak yang teratasi 3. Jumlah bantuan yang diberikan pada masyarakat

Strategi : Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana
3. Meningkatnya ketangguhan kota terhadap bencana
4. Meningkatkan penanganan lahan kritis dibeberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana ,sinergi dan berkesinambungan antara pemangku kepentingan dan lintas sektorMengelola
5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana
6. Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menyediakan Informasi Tentang Daerah Rawan Bencana
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana
8. Meningkatkan kesiapsiagaan warga kota mengantisipasi penanggulangan bencana

Visi dan Misi OPD.

Sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No,86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD, bahwa Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi Dasar dalam Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan : adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksaanakan Misi dan menangani Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah diatas, telah ditetapkan tujuan dalam RENSTRA Badan KesbangPol dan PBD yaitu :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan Wargakota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana
2. Meningkatnya nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban Umum Masyarakat kota Sawahlunto

Sasaran : adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran dari Tujuan 1 tersebut adalah :

- Terwujudnya kesiapsiagaan BPBD dan warga kota dalam Antisipasi dalam Penanggulangan Bencana

Sasaran dari Tujuan 2 tersebut adalah

- Terwujudnya ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat berdasarkan nialai-nilai Ideologi Pancasila

TABEL 3.1
TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

MISI 7 : TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MERATA DAN MEMADAI

TUJUAN : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN WARGA KOTA DALAM ANTISIPASI DAN PENAGGULANAN BENCANA

Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Pada Tahun ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode RENSTRA	
							n+1		n+2		n+3		n+4		n+5			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan Wargakota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	*Persentase Masyarakat yang Terlayani Kebencanaa*	1.1.1	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	Persentase Dokumen Mitigasi SOP Informasi Pra Bencana	30.4%	65%	52,500,000	70%	297,750,000	75%	453,025,000	80%	48,327,500	85%	68,660,250	85%	1,120,262,750
			1.1.1.1	Penyusunan Dokumen RPB	Jumlah Dokumen RPB yang disusun		1	0		1	250,000,000	0	0	0	0	0	1	350,000,000
			1.1.1.2	Penyusunan Dokumen Kontigensi	Jumlah Dokumen Renkon yang disusun		1	0	0	1	200,000,000	2	300,000,000	0	0	0	3	500,000,000
			1.1.1.3	Penyusunan SOP Kouencanaan	Dokumen SOP yang disusun		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			1.1.1.4	Pembuatan Rambu Bencana,Leaflet dan baliho	Jumlah Rambu Bencana,Leaflet dan baliho yang disediakan		0	75	50,000,000	50	45,000,000	80	50,000,000	40	45,000,000	50	65,000,000	265	255,000,000
			1.1.1.5	Pembuatan Iklan	Jumlah iklan bencana di radio		0	12	2,500,000	12	2,750,000	12	3,025,000	12	3,327,500	12	3,660,250	60	15,262,750
		Pesentase masyarakat yang terlayani pada saat terjadi kebencanaan	1.1.2	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase bencana yang tertanggani sesuai standar	50%	65%	1,006,861,000	70%	1,130,195,570	80%	1,228,726,895	85%	1,303,53 336	85%	1,409,960,968	85%	079,276,769
			1.1.2.1	Sosialisasi Kebencanaan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan		0	0		80	43,672,000	90	55,000,000	100	60,000,000	120	65,000,000	390	223,672,000
			1.1.2.2	Pelatihan kesiapsiagaan bencana bag pelajar	Jumlah pelajar yang mengikuti Pelatihan (orang)		100	100	42,672,000	100	44,165,520	100	45,711,313	100	47,311,209	100	48,967,101	500	228,827,144
			1.1.2.3	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB)	Jumlah KSB dan anggota yang terbentuk		186	186	182,350,000	236	205,000,000	340	240,000,000	408	257,000,000	510	300,000,000	1682	1,182,350,000
			1.1.2.4	Pembentukan Desa Tanggun Bencana (DESTANA)	Jumlah Destana yang terbentuk (Desa)		2	2	226,200,000	2	250,000,000	2	260,000,000	2	275,000,000	2	210,000,000	10	1,291,200,000
			1.1.2.5	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk		0	1	101,409,000	1	110,000,000	1	125,000,000	1	137,000,000	1	150,000,000	5	625,409,000
			1.1.2.6	Diklat Peningkatan SDM KSB	Jumlah Anggota KSB yang mengikuti Diklat		0	3	20,000,000	5	30,000,000	7	40,000,000	9	50,000,000	10	70,000,000	34	210,000,000
			1.1.2.7	Pelatihan Gabungan Dalam dan Lintas Daerah	Jumlah Personil PB yang mengikuti Pelatihan Dalam dan Lintas daerah			120	169,659,000	120	175587750	120	181,733,321	120	188,093,987	120	194,677,277	600	909,742,336
			1.1.2.8	Operasional Penanggulangan dan Emergency Bencana	Jumlah Emergency Bencana yang dilaksanakan	23	12	26,580,000	12	271,770,400	12	281,282,261	12	291,127,140	12	301316590	60	1,408,076,290
1.2			1.2.1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PB	Persentase ketersediaan aparatur kesiapsiagaan Bencana	23	52%	22,000,000	48%	25,000,000		12,000,000		15,000,000		20,000,000		94,000,000
					Persentase Peningkatan Kompetensi Petugas Kesiapsiagaan Bencana		10%		12%		14%		16%		18%	70%		
			1.2.1.1	Recruitment Personil PB	Jumlah recruitment petugas Kesiapsiagaan Bencana	23	12	15,000,000	11	15,000,000							23	30,000,000
			1.2.1.3	Diklat Peningkatan Kompetensi Personil PB	Jumlah personil PB mengikuti Diklat Kompetensi	0	2	7,000,000	3	10,000,000	4	12,000,000	5	15,000,000	6	20,000,000	20	64,000,000
			1.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Persentase ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar	35%	40%	8,330,910,000	45%	1,769,31 ,300	50%	286,932,843	60%	301,090,473	65%	215,781,870		10,904,027,486
			1.2.2.1	Pengadaan Peralatan PB	Jumlah Peralatan PB yang diadakan (jenis)		6	6	74,880,000	7	1,578,624,000	6	81,375,840	6	85,444,632	6	89,716,864	31	1,910,041,336

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Pada Tahun ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode RENSTRA	
					n+1		n+2		n+3		n+4		n+5			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		1.2.2.2 Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Gudang yang dibangun	0		350,000,000	1								1	350,000,000
		1.2.2.3 Pembangunan Gedung Pusdalops PB	Jumlah Gedung Pusdalops PB yang dibangun	0		7,600,000,000	1								1	7,600,000,000
		1.2.2.4 Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana Dalam Daerah	Jumlah Logistik yang tersedia (jenis)		5	63,150,000	5	66,307,500	5	69,622,875	5	73,104,019	5	76,759,220	25	348,943,613
		1.2.2.5 Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana Lintas Daerah	Jumlah Logistik yang tersedia		3	27,880,000	3	28,855,800	3	29,865,753	3	30,911,054	3	31,992,941	15	149,505,549
		1.2.2.6 Pembuatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Jumlah Sistem Peringatan Dini yang terpasang	0	5	200,000,000	2	80,000,000	2	90,000,000	2	95,000,000	2	100,000	13	465,100,000
		1.2.2.7 Pemeliharaan Peralatan penanggulangan bencana	Jumlah Alat PB yang dipelihara (buah)	12	12	15,000,000	12	15,525,000	12	16,068,375	12	16,630,768	12	17,212,845	60	80,436,988
		1.2.3 **Program Penanganan Tanggap Darurat**	**Persentase Kejadian Tanggap Darurat yang tertangani**	0		60,000,000		62,100,000		37,492,875		65,745,751		40,163,305		
		1.2.3.1 Penyusunan Protap Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Protap tanggap Darurat yang disusun	0	1	40,000,000									1	40,000,000
		1.2.3.2 Sosialisasi Protap Tanggap Darurat	Jumlah Peserta Sosialisasi Tanggap Darurat	0	75	25,000,000	75	23,875,000			75	26,780,625			225	77,655,625
		1.2.3.3 Pembentukan TRC Kota		0	1	20,000,000									1	
		1.2.3.4 MOU Penanganan Bencana dengan BUMN dan Pihak Swasta	Jumlah MOU yang ditanda tangani	0	1		1		1		1		1		5	
		1.2.3.5 Pelatihan Bersama TRC	Jumlah Anggota TRC mengikuti Pelatihan Bersama	0	150	35,000,000	150	96,225,000	150	37,492,875	150	38,805,126	150	40,163,305	750	187,686,306
	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Paskah Bencana	1.3.1 **Program Perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana**	**Jumlah Data Infrastruktur,Faskes,Fasos dan Fasum yang rusak Pasca Bencana**		30	16,446,000	35	571,750,000	40	591,761,250	45	612,472,894	50	633,909,445		2,476,339,589
			Persentase perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana													
		1.3.1.1 Sosialisasi dan Koordinasi Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Koordinasi Rehab Pasca Bencana (orang)	0	125	50,000,000	125	51,750,000	125	53,561,250	125	55,435,894	125	57,376,150	625	268,123,294
		1.3.1.2 Inventarisasi, Identifikasi Kerusakan/Kerugian dan Penetapan Prioritas Rehabilitasi serta Inventarisasi Sumber Daya Pasca Bencana	Jumlah Laporan Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana yang diverifikasi				1	20,000,000	1	20,700,000	1	21,424,500	1	22,174,358	4	84,298,858
		1.3.1.3 Operasional Rehabilitasi Pasca Bencana			1	16,446,000										
		1.3.1.4 Pelaksanaan Rehabilitasi ,Monitoring,Evaluasi serta Pelaporan Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Rehabilitasi Infrastuktur /Faskes/fasum/Fasos dan Laporan Rehabilitasi Pasca Bencana	0				500,000,000		517,500,000		535,612,500		554,358,938		2,107,471,438
		1.3.2 **Program Rekonstruksi Pasca Bencana**	**Jumlah Infrastruktur,Faskes ,Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani**			913,055,800		847,370,315		928,778,276		961,285,516		994,930,509		4,163,420,415
			Jumlah Korban Bencana yang tertangani Pasca Bencana													
		1.3.2.1 Perencanaan,Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/kerugian serta prioritas Pembangunan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Rekonstruksi Pasca Bencana				1	20,000,000	1	20,700,000	1	21,424,500	1	22,174,358	5	84,298,858
		1.3.2.2 Operasional Rekonstruksi Pasca Bencana			1	16,446,800									1	16,446,800
		1.3.2.3 Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Infrastruktur,Faskes,Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang direkonstruksi					500,000,000		517,500,000		535,612,500		554,358,938	0	2,107,471,438
		1.3.2.4 Pelaksanaan kegiatan Ulta Pasna	Jumlah Dokumen Ulta Pasna	1	1	144,609,000	1	346,670,315	1	369,153,776	1	382,074,158	1	395,446,754	5	1,847,954,003
		1.3.2.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Laporan Monev Rekonstruksi Pasca Bencana	0		20,000,000		20,700,000		21,424,500		22,174,358		22,950,460	0	107,249,318

TABEL 3.2

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG WISATA YANG KREATIF, INOVATIF,UNGGUL, BERMARTABAT,BERKEADILAN DAN SEJAHTERA
MISI : MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN INOVATIF
TUJUAN : MENINGKATNYA NILAI WAWASAN KEBANGSAAN, KETENTRAMAN ADAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO

Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator	Data Awal (2018)	Target Kinerja pada Tahun ke										Kondisi Akhir Periode RENSTRA	
							n + 1		n + 2		n + 3		n + 4		n + 5			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.1	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat berdasarkan nilai nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban di Kota Sawahlunto	2.1.1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Wasbang		40	405,415,000	45	431,886,800	50	460,458,248	55	491,316,611	60	524,666,887	250	2,313,743,546
					Jumlah Pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan hari-hari besar yang difasilitasi		3		3		3		3		3		15	
					Jumlah Forum-forum strategis di daerah		3		3		4		4		4		19	
			2.1.1.1	Pembinaan Karakter dan peningkatan kesdaran bela negara	Jumlah Peserta Pembinaan (orang)	0	90	76,962,000	90	84,658,200	90	93,124,020	90	102,436,422	90	112,680,064	450	469,860,706
			2.1.1.2	Simulasi cinta tanah air dan bela Negara	Jumlah Peserta Simulasi (orang)		220	39,517,000	220	43,710,700	220	48,081,770	220	52,889,947	220	58,178,942	1,100	242,598,359
			2.1.1.3	Penyuluhan pemantapan wawasan kebangsaan bagi aparatur, tokoh masyarakat dan pelajar	Jumlah Peserta penyuluhan (orang)		250	51,880,000	250	57,068,000	250	62,774,800	250	69,052,280	250	75,957,508	1,250	316,732,588
			2.1.1.4	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei	Jumlah Peringatan Hariknas yang difasilitasi	0	1	14,037,000	1	14,730,850	1	15,497,843	1	16,272,735	1	17,086,371	5	77,673,798
			2.1.1.5	Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni	Jumlah Peringatan Hari Lahir PancaSila yang difasilitasi	0	1	15,417,000	1	16,187,850	1	16,997,243	1	17,847,105	1	18,739,460	5	85,188,657
			2.1.1.6	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober	Jumlah Peringatan Hari Kesaktian PancaSila yang difasilitasi	0	1	15,417,000	1	16,187,850	1	16,997,243	1	17,847,105	1	18,739,460	5	85,188,657
			2.2.1.1	Penguatan Forum Pemersatuan Kebangsaan	Jumlah Forum yang dibentuk	0	50	14,490,000	50	15,914,503	50	16,390,905	50	16,882,632	50	17,389,111	250	82,026,148
					Jumlah Pembinaan Forum (kali)	0	1		1		1		1		1		5	
			2.2.1.2	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Forum yang dibentuk		1	95,945,000		98,823,850		101,788,051		104,841,692		107,986,943	1	509,385,035
					Jumlah Pembinaan (kali)		4		4		4		4		4		20	
			2.2.1.3	Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Forum KDM yang dibentuk		1	80,550,000	4	84,577,500		88,806,375		93,246,694		97,909,028	5	445,089,597
					Jumlah Laporan KDM		12		12		12		12		12		60	
2.2			2.3.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu	100%	100 %	941,250,000	100%	971,991,500	100%	1,003,764,840	100%	1,036,583,269	100%	1,070,489,211	100%	5,024,085,820

			2.3.1.1	Monitoring dan Pemantauan orang asing	Jumlah Laporan Tim Koordinasi Wasing	4	4	25,000,000	4	26,250,000	4	27,562,500	4	28,940,625	4	30,387,656	20	138,140,781
			2.3.1.2	Fasilitasi Keamanan pada hari hari besar, pelaksanaan event daerah,nasional dan internasional	Jumlah keamanan Event yang terfasilitasi	12	12	198,250,000	12	205,178,750	12	212,370,356	12	219,803,319	12	227,496,435	60	1,063,098,860
			2.3.1.3	Optimalisasi pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Budaya dan Ekonomi yang tertangani		80%	123,400,000	80%	127,719,000	80%	132,189,165	80%	136,815,786	80%	141,604,338	80%	661,728,289
			2.3.1.4	Penyelenggaraan Kewaspadaan dini daerah	Jumlah Sosialisasi Kewaspadaan Dini		1	80,550,000	1	83,369,250	1	86,287,174	1	89,307,225	1	92,432,978	5	431,946,626
					Persentase Rekondisi hasil rapat yang ditindaklanjuti		90%		90%		90%		90%		90%		90%	
			2.3.1.5	Fasilitasi Komite Intelijen Daerah	Jumlah Laporan Kominda	12	12	73,300,000	12	75,499,000	12	77,763,970	12	80,096,889	12	82,499,796	60	389,159,655
			2.3.1.6	Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Jumlah Forkopimda yang difasilitasi	12	12	367,450,000	12	378,473,500	12	389,827,705	12	401,522,536	12	413,568,212	60	1,950,841,953
			2.3.1.7	Monitoring dan evaluasi aliran kepercayaan masyarakat	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi aliran kepercayaan		4	73,300,000	4	75,499,000	4	77,763,970	4	80,096,889	4	82,499,796	20	389,159,655
			2.3.2	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyalit Masyarakat**	**Persentase Masyarakat yang memahami bahaya dan dampak Narkotika**			43,200,000		44,712,000		46,276,920		47,896,612		49,572,994		231,658,526
			2.3.2.1	Penyelenggaraan Aksi Narkoba dalam rangka Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia di Kota Sawahlunto	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)		250	43,200,000	250	44,712,000	250	46,276,920	250	47,896,612	250	49,572,994	1250	231,658,526
2.3			2.3.3	**Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum**	**Jumlah Gangguan terhadap Pemilu yang ditindaklanjuti**			101,850,000										101,850,000
			2.3.3.1	Monitoring Pemilihan Umum 2019 (Pilpres dan Pileg)	Jumlah Laporan Monitoring Pemilu	3	3	101,850,000									3	101,850,000
			3.1.1	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan Budaya Politik**		900	156,550,000		22,433,625		23,218,802		24,031,460		24,872,561		251,106,448
					Persentase Anggota Parpol yang memahami peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban keuangan parpol		70%		70%		70%		70%		70%		70%	
			3.1.1.1	Diskusi Politik bag. Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta Diskusi Politik (orang)		300	32,675,000									300	32,675,000
			3.1.1.2	Sosialisasi Pemilu kepada Pemilih Pemula dan Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)		300	32,675,000										32,675,000
			3.1.1.3	Diskusi Politik bersama Ormas	Jumlah Peserta Diskusi Politik (orang)		100	23,175,000									100	23,175,000
			3.1.1.4	Sosialisasi Pemilu atau Pemilukada bersama Parpol	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)		100	23,175,000									100	23,175,000
			3.1.1.5	Diskusi Politik bersama Penyelenggara Pemilu/Pemilukada	Jumlah Peserta Diskusi Politik (orang)		100	23,175,000									100	23,175,000
			3.1.1.6	Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Jumlah Peserta Bimtek (orang)		70	21,675,000	70	22,433,625	70	23,218,802	70	24,031,460	70	24,872,561	350	116,231,448
			3.1.2	**Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum**	**Jumlah Gangguan terhadap Pemilu yang ditindaklanjuti**			101,850,000										101,850,000
			3.1.2.1	Monitoring Pemilihan Umum 2019 (Pilpres dan Pileg)	Jumlah Laporan Monitoring Pemilu	3	3	101,850,000									3	101,850,000

Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator	Data Awal (2018)	Target Kinerja pada Tahun ke										Kondisi Akhir Periode RENSTRA	
							n + 1		n + 2		n + 3		n + 4		n + 5			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.1			3.1.1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan Budaya Politik		900	106,550,000		22,433,625		23,218,802		24,031,460		24,872,561		251,106,448
					Persentase Anggota Parpol yang memahami peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban keuangan parpol		70%		70%		70%		70%		70%		70%	
			3.1.1.1	Diskusi Politik bagi Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta Diskusi Politik (orang)		300	32,675,000									300	32,675,000
			3.1.1.2	Sosialisasi Pemilu kepada Pemilih Pemula dan Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)		300	32,675,000										32,675,000
			3.1.1.3	Diskusi Politik bersama Ormas	Jumlah Peserta Diskusi Politik (orang)		100	23,175,000									100	23,175,000
			3.1.1.4	Sosialisasi Pemilu atau Pemilukada bersama Parpol	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)		100	23,175,000									100	23,175,000
			3.1.1.5	Diskusi Politik bersama Penyelenggara Pemilu/Pemilukada	Jumlah Peserta Diskusi Politik (orang)		100	23,175,000									100	23,175,000
			3.1.1.6	Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Peserta Bimtek (orang)		70	21,675,000	70	22,433,625	70	23,218,802	70	24,031,460	70	24,872,561	350	116,231,448
			3.1.2	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Jumlah Gangguan Terhadap Pemilu yang ditindak lanjuti			101,850,000										101,850,000
			3.1.2.1	Monitoring Pemilihan Umum 2019 (Pileg dan Pilpres)	Jumlah Laporan Monitoring Pemilu	4	3	101,850,000									3	101,850,000

2. RENCANA KERJA PEMERINTAH

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan sebagian besar masih melanjutkan kegiatan prioritas pada Anggaran 2020, melakukan efaktifitas waktu pelaksanaan program/kegiatan dan kemampuan keuangan daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas dengan indikator kinerja capaian , output dan outcome sesuai dengan format tabel 4 berikut, dimana rencana Program yang diajukan berjumlah 5 program dengan 11 Kegiatan yang terdiri dari 24 sub kegiatan, berupa:

1. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 1 Program yang merupakan penunjang tugas dan fungsi Bidang dalam Penanggulangan Bencana dengan 3 Kegiatan:
   a) Program Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 Kegiatan dengan 7 Sub Kegiatan.
2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi termasuk dalam 1 Program yang sama dengan Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan
   a) Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 Program yang merupakan penunjang tugas dan fungsi Bidang dengan 2 Kegiatan.
   a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
   b) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
4. Sekretariat terdiri dari 1 Program yang merupakan penunjang tugas dan fungsi Badan serta pelayanan Administrasi dengan 6 Kegiatan.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana**	**Persentase Masyarakat yang terlayani informasi kebencanaan**	**70%**
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	
		Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi Bencana	**50%**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	
		2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	
		3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	
		2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	5
		Persentase Fasum yang Tertangani pada Saat Pasca Bencana	**15%**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		1. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
2	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila**	**Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto**	**60%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	
		1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
3	**Terwujudnya Pelayanan dan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar**	**100%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	12
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12
		Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Disediakan	**100%**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12
		1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

BAB IV
PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari 2 (Dua) sasaran strategi Generik yang terdiri dari :

1. Sasaran Strategis : dengan tolak ukur pencapaian indikator Tujuan/sasaran yang merupakan Sasaran yang terkait dengan Misi 7 RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu : "Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga kota dalam Atisipasi dan Penanggulangan Bencana Alam"

2. Sasaran Strategis dengan tolak ukur pencapaian indicator tujuan / sasaran yang merupakan sasaran yang terkait dengan misi 4 RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu: "Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat berdasarkan Nilai-nilai Ideologi Panca Sila"
3. Sasaran strategi yang merupakan sasaran strategi yang bersifat generik yang melekat dengan urusan pelayanan internal (Administrasi SDM, Perencanaan/Program dan Keuangan) OPD

Dari 2 (Dua) Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto diatas diimplementasikan dengan 4 Program yang diuraikan dalam 11 kegiatan dengan 24 sub kegiatan yang diukur pencapaiannya sebagai kinerja urusan OPD.

Perjanjian Kinerja dimaksud diuraikan pada Tabel Penetapan Kinerja (Lampiran 1 /5-6).

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan komitmen terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan seluruh Sasaran Strategis Tahunan yang dijalankan dalam bentuk program – program berikut kegiatan kerja yang telah dijabarkan sesuai sasaran kinerja dan urutan penyusunan yang diupayakan secara skala prioritas.

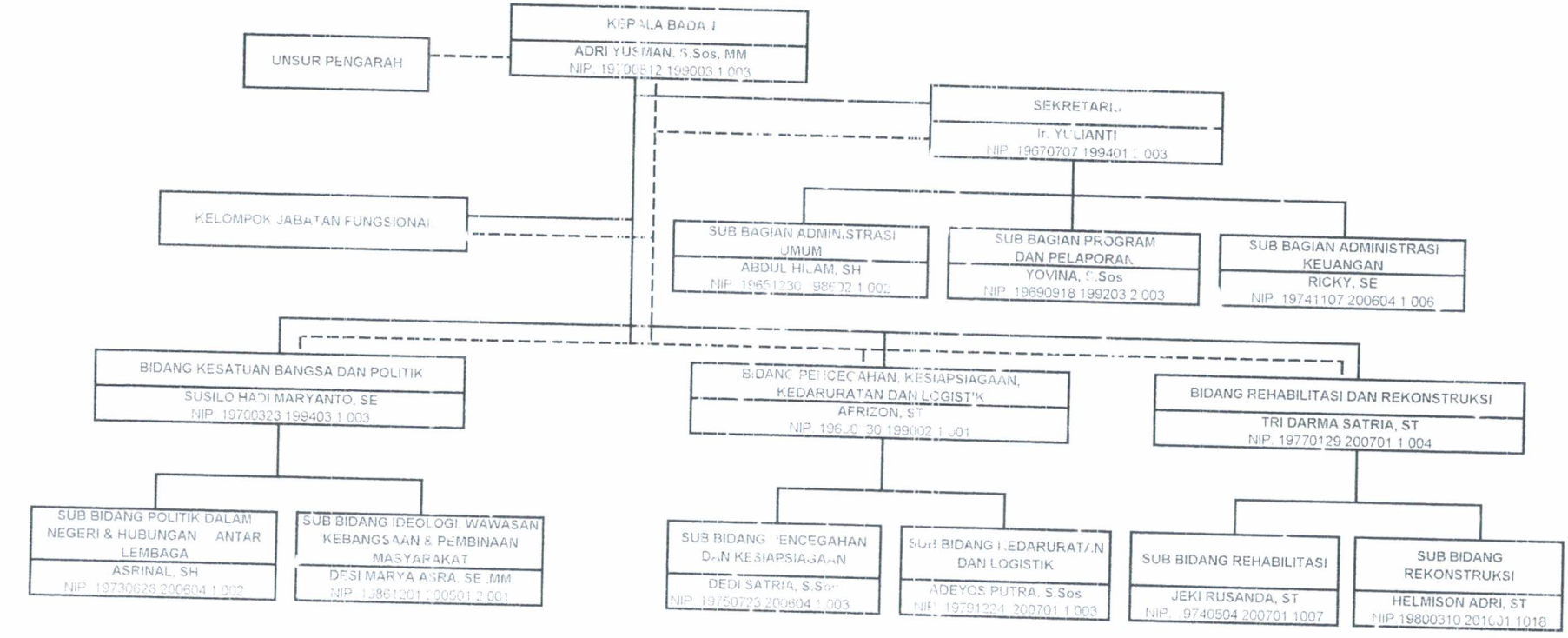
Ruang lingkup Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bagi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan cakupan dari tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 14 Tahun 2016 yang meliputi tugas di Bidang Administratif Kesekretariatan, Kesatuan Bangsa, Politik dan Pencegahan serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana di Kota Sawahlunto.

Keseluruhan Pandangan kinerja tersusun untuk dilaksanakan berjumlah 4 Program yang diuraikan dalam 11 Kegiatan dengan 24 Sub Kegiatan yang merupakan tekad yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 ini.

2. SARAN

Seluruh program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Perjanjian Kinerja, harus berdasarkan urutan skala prioritas. Untuk itu harus disusun jadwal waktu kegiatan yang memperhitungkan target kinerja yang telah direncanakan dan memperhatikan kondisi perkembangan daerah yang terjadi dalam tahun 2021. Agar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini dapat secara konsisten terlaksana sesuai target waktu yang telah ditetapkan dibutuhkan tekad dan pengawasan manajemen dan evaluasi periodik waktu, sehingga pencapaian hasil terukur secara nyata.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KETERANGAN :

———— : GARIS KOMANDO

- - - - - - - - : GARIS KOORDINASI

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. YULIANTI**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADRI YUSMAN.S.SoS.MM**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
ADRI YUSMAN S.SoS.MM	Ir. YULIANTI
NIP.19700812 199003 1 003	NIP. 19670707 199401 2 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ESELON III : **SEKRETARIS BADAN**
Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Terwujudnya Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Yang Baik**	**Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar**	100%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12
		3. Penyediaan bahan Logistik Kantor	12
		4. Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12
		Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Disediakan	12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12%
		1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
		Tersusunnya Data dan Informasi	100%
		Perencancan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	
	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**32,500,000**
1.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10,000,000
1.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,500,000

2.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**273,158,130**
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,402,000
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,271,130
2.3	Penyediaan bahan logistik kantor	21,740,000
2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33,480,000
2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,885,000
2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,380,000
3.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**262,217,360**
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	187,413,360
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,804,000
4.	**Pemeliharaan Barang Milik Daeraah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**200,623,050**
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138,663,800
4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42,890,150
4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,070,000
5.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5,648,400**
5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,648,400
	Jumlah Angggaran	**774,147,840**

KEPALA BADAN KESBANG POL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRIYUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

Sawahlunto, Januari 2021
SEKRETARIS BADAN

Ir. YULIANTI
NIP.19670707 199401 2 003

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ABDUL HILAM.SH**

Jabatan : Kasubag Administrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. YULIANTI**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
Ir. YULIANTI	ABDUL HILAM.SH
NIP.19670707 199401 2 003	NIP. 19651210 198602 1 002

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ESELON IV : **KASUBAG ADMINISTRASI UMUM**
Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Terwujudnya Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Yang Baik**	**Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar**	**100%**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12
		1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12
		2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12
		3. Penyediaan bahan logistik kantor	12
		4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
		5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12
		6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12
		Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Disediakan	**100%**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	12
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12
		1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12
		2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1
		3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus dan Pelatihan	**12**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12
		1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	12
		2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	12
		Administrasi Keuangan Berjalan Lancar	**12**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12
		1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**4,037,079,440**
	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**32,500,000**
1.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	10,000,000
1.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	22,500,000
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**273,158,130**
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	5,402,000
2.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	88,271,130

2.3	Penyediaan bahan logistik kantor	21,740,000
2.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33,480,000
2.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,885,000
2.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	121,380,000
3.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**262,217,360**
3.1	Penyediaan jasa surat menyurat	187,413,360
3.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74,804,000
4.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**200,623,950**
4.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	138,663,800
4.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	42,890,150
4.3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	19,070,000
5.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3,268,580,000**
5.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3,268,580,000
	Jumlah Anggaran	**4,037,079,440**

Sawahlunto, Januari 2021

SEKRETARIS BADAN

Ir. YULIANTI
NIP.19670707 199401 2 003

KASUBAG ADMINISTRASI UMUM

ABDUL HILAM, SH
NIP.19651230 198602 1 002

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : **YOVINA. S.SoS**

Jabatan : Kasubag Program dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. YULIANTI**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggu langan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
Ir. YULIANTI	YOVINA.S.SoS
NIP.19670707 199401 2 003	NIP. 19690918 199203 2 000

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ESELON IV : **KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN**
Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	100%
		Persentase Dokumen Laporan Pemerintahan dan Kinerja sesuai dengan pedoman	100%
		Persentase Laporan Evaluasi Rutin dan Berkala sesuai dengan pedoman	100%
		Persentase Data/Informasi yang tersedia	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**5,648,400**
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,648,400
	1 1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5,648,400
	Jumlah Anggaran.....	**5,648,400**

Sawahlunto, Januari 2021

SEKRETARIS BADAN

Ir.YULIANTI
NIP.19670707 199401 2 003

KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN

YOVINALSOS
NIP19690918 199203 2 003

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RICKY. SE**
Jabatan : Kasubag Administrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. YULIANTI**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
Ir. YULIANTI	RICKY. SE
NIP.19670707 199401 2 003	NIP. 19741107 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ESELON IV : KASUBAG ADMINISTRASI KEUANGAN
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tertib Aministrasi Keuangan	Jumlah Laporan SPJ/TU tepat waktu	90%
		Jumlah SPP dan SPM GU yang tepat waktu	90%
		Jumlah SPP dan SPM LS yang tepat waktu	90%
		Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu	90%
		Jumlah Bukti Bukti Pengawasan sesuai dengan aturan	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran

Sawahlunto, Januari 2021

SEKRETARIS BADAN

Ir.YULIANTI
NIP.19670707 199401 2 003

KASUBAG ADMINISTRASI KEUANGAN

RICKY, SE
NIP.19741107 200404 1 006

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARFIZON. ST**

Jabatan : Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan Logistik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggu langan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADRI YUSMAN.S.SoS.MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggula ngan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
ADRI YUSMAN S.SoS.MM	ARFIZON. ST
NIP.19700812 199003 1 003	NIP. 19631118 198602 1 001

Anak Lampiran I/5/6

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON III : **Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan , Kedaruratan dan Logistik Bencana**

Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan pra Bencana	**Persentase masyarakat yang memahami kondisi kerawanan dan peran serta didalam penanggulangan Bencana**	**85%**
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3
		1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab./Kota	238
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70%
		1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	70%
		2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	12
		3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12
		1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	12
		2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Penanggulangan Bencana	
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	**70,530,150**
1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	70,530,150
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**335,508,160**
2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	64,197,400
2.2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	96,900,000
2.3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	174,410,760
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**924,776,595**
3.1 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kab/Kota	837,811,600
3.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	86,964,995
Jumlah Angggaran	**1,330,814,905**

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN S.SOs, MM
NIP.19700812 199003 1 003

KABID PENCEGAHAN,KESIAPSIGAAN,KEDARURATAN DAN LOGISTIK

ARFIZON, ST
NIP.19631110 198602 1 001

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DEDI SATRIA. S.SoS**

Jabatan : Kasubid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARFIZON. ST**

Jabatan : Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan logistik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulagan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
ARFIZON. ST	DEDI SATRIA. S.SoS
NIP. 19631118 198602 1 001	NIP. 19750723 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV : **Kasubid Pencegahan dan Kesiapsiagaan**
Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
i	**Meningkatnya Pelayanan pra Bencana**	**Persentase masyarakat yang memahami kondisi kerawanan dan peran serta didalam penanggulangan Bencana**	**85%**
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3
		1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	238
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	80
		1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	90%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Penanggulangan Bencana	
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	**70,530,150**
1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	70,530,150
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**64,197,400**
2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	64,197,400
Jumlah Angggaran	**134,727,550**

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021

KABID PENCEGAHAN,KESIAPSIGAAN,KEDARURATAN DAN LOGISTIK

ARFIZON, ST
NIP.19631118 198602 1 001

KASUBID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

DEDI SATRIA, S.Sos
NIP.19750723 200604 1 003

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ADE YOS PUTRA. S.SoS**

Jabatan : Kasubid Kedaruratan dan logistik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARFIZON. ST**

Jabatan : Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan logistik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
ARFIZON. ST	ADE YOS PUTRA.S.SoS
NIP. 19631118 198602 1 001	NIP. 19791224 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV : **Kasubid Kedarutan dan Logistik**
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Kesiapsiagaan Bencana**	**70%**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	6
		1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	12
		2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	75%
2	**Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana**	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**90%**
		1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	12
		2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. **Program Penanggulangan Bencana**	
1. **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**271,310,760**
1.1 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	96,900,000
1.2 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	174,410,760
2. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**924,776,595**
2.1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	837,811,600
2.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	86,964,995
Jumlah Angggaran	**1,196,087,355**

KABID PENCEGAHAN,KESIAPSIGAAN,KEDARURATAN DAN LOGISTIK

ARFIZON, ST
NIP.19631115 198602 1 001

KASUBID KEDARURATAN DAN LOGISTIK

ADEYOS PUTRA, S.Sos
19791224 200701 1003

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TRI DARMA SATRIA. ST**

Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADRI YUSMAN.S.SoS.MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
ADRI YUSMAN S.SoS.MM	TRI DARMA SATRIA. ST
NIP.19700812 199003 1 003	NIP. 19770129 200701 1 004

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON III : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2	**Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana**	**Persentase fasilitas umum diperbaiki**	**15%**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1,12
		1. Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	6

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. **Program Penanggulangan Bencana**	**11,408,601,120**
1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
1.1 Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	11,408,601,120
Jumlah Angggaran	**11,408,601,120**

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

TRI DARMASATRIA, ST
NIP.19770129 200701 1004

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JEKI RUSANDA. ST**

Jabatan : Kasubid Rehabilitasi pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TRI DARMA SATRIA. ST**

Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
TRI DARMA SATRIA. ST	JEKI RUSANDA. ST
NIP. 19770129 200701 1 004	NIP. 19740504 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV : **Kepala Sub Bidang Rehabilitasi**
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Tersedianya Data Paca Bencana yang Akurat**	Jumlah Data Infrastruktur, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang Rusak Pasca Bencana	90%
		Jumlah Data Korban dan Bantuan Pasca Bencana	100%
		Laporan Kegiatan Rehabilitasi	100%

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

TRI DARMA SATRIA, ST
NIP.19770129 200701 1004

KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI

EKO RUSANDA, ST
NIP.19720504 200701 1007

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HEMILSON ADRI. ST**

Jabatan : Kasubid Rekonstruksi pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TRI DARMA SATRIA. ST**

Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Rekonstrruksi pada Badan Kesa - tuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
TRI DARMA SATRIA. ST	HEMILSON ADRI. ST
NIP. 19770129 200701 1 004	NIP. 19800310 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV : **Kepala Sub Bidang Rekontruksi**
Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	**Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana**	**Persentase Laporan Kesiapan Rekonstruksi Pasca Bencana**	**100%**
		Dokumen dan Laporan Rencana Kegiatan Sub Bidang Rekonstruksi	100%
		1. Evaluasi dan Analisis terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. **Program Penanggulangan Bencana**	**11,408,601,120**
1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
1.1 Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	11,408,601,120
Jumlah Anggaran	**11,408,601,120**

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021

KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

TRI DARMA SATRIA, ST
NIP.19770129 200701 1004

KASUBID REKONSTRUKSI

HELMISON ADRI, ST
19800310201001 1010

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUSILO HADI MARYANTO. SE**

Jabatan : Kepala Bidang Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADRI YUSMAN.S.SoS.MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
ADRI YUSMAN S.SoS.MM	SUSILO HADI MARYANTO. SE
NIP.19700812 199003 1 003	NIP. 19700323 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON III : **Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**
Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila**	**Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto**	**55%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	4
		1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12
		1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	156,340,190
1. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	
1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	156,340,190
2. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	1.267,768,424
1. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	-
2.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.267,768,424
Jumlah Angggaran	**1,424,108,614**

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

SUSILO HADI MARYANTO, SE
NIP.19700323 199403 1 003

Anak Lampiran IA1/2-6

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Kec. Barangin Kode Pos 27424
Telp. (0754) 61137 Fax. (0754) 62466

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADRI YUSMAN, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DERI ASTA. SH

Jabatan : Walikota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
DERI ASTA. SH	**ADRI YUSMAN, S. Sos, MM**
	NIP. 19700812 199003 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang terlayani informasi kebencanaan	85%
		Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi Bencana	65%
		Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	15%
2	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	45%

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

Anak Lampiran I/5/6

PERJANJIAN KINERJA
ESELON II PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON II	:	**Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto**
Tahun Anggaran	:	**2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana**	**Persentase Masyarakat yang terlayani informasi kebencanaan**	**70%**
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3
		1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis bencana)	238
		Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi Bencana	**50%**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12
		1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	6
		2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	12
		3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	5
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1
		1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	**15%**
		2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	1,2
		Persentase Fasum yang Tertangani pada Saat Pasca Bencana	1,20
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,30
		1. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1,12
2	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila**	**Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto**	55%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	4
		1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12
		1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12
3	**Terwujudnya Pelayanan dan Administrasi**	**Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar**	12
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**100%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12
		4. Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12
		Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Disediakan	1
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12
		1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12

	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4,042,727,940
2.	Program Penanggulangan Bencana	12,739,416,025
3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	156,340,190
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1,267,768,424
	Jumlah Angggaran	**18,206,252,579**

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA, SH.

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DESI MARYA ASRA. SE.MM**

Jabatan : Kasubid Idiologi Wasbang dan Pembinaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggula ngan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUSILO HADI MARYANTO. SE**

Jabatan : Kabid Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
SUSILO HADI MARYANTO. SE	DESI MARYA ASRA. SE.MM
NIP. 19700323 199603 1 003	NIP. 19861201 200501 2 001

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV : **Kasubid Ideologi, Wasbang dan Pembinaan Masyarakat**
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila**	**Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto**	**55%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**156,340,190**
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	156,340,190
	Jumlah Angggaran	**156,340,190**

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

SUSILO HADI MARYANTO, SE
NIP 19700323 199403 1 003

KASUBID IDEOLOGI,WASBANG DAN PEMBINAAAN MASYARAKAT

DESI MARYANASPA, SE, MM
NIP.19861201 200501 2 001

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ASRINAL. SH**
Jabatan : Kasubid Politik Daiam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUSILO HADI MARYANTO. SE**
Jabatan : Kabid Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, Januari 2021

PIHAK KEDUA

SUSILO HADI MARYANTO. SE
NIP. 19700323 199603 1 003

PIHAK PERTAMA,

ASRINAL. SH
NIP. 19730628 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV	:	**Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga**
Tahun Anggaran	:	**2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila**	**Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto**	**55%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12
		1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**1,267,768.424**
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
1.1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,267,768,424
Jumlah Anggaran	**1,267,768,424**

SAWAHLUNTO, JANUARI 2021

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

SUSILO HADI MARYANTO, SE
NIP.19700323 199403 1 003

Kasubid Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga

ASRINAL, SH
NIP.19730628 200604 1 002

DAFTAR : LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	DPA 2021 (Rp)	KET
1	2	3	4
	BELANJA DAERAH		
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**774,147,840.00**	
1	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*		
1.1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10,000,000.00	
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,500,000.00	
1.2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,402,000.00	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,271,130.00	
c.	Penyediaan bahan Logistik Kantor	21,740,000.00	
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33,480,000.00	
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,885,000.00	
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,380,000.00	
1.3	**Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah**		
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	187,413,360.00	
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,894,000.00	
1.4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138,663,800.00	
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,898,156.00	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19,070,000.00	
1.5	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,648,400.00	
2	*PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA*	12,739,416,025.00	
1.1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		
a.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	70,530,150.00	
1.2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	64,197,400.00	

b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	96,900,000.00	
c.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	174,410,760.00	
d.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	11,408,601,120.00	
1.3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		
a.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	837,811,600.00	
b.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	86,964,995.00	
II	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**3,274,228,500.00**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah**		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,648,400.00	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,268,580,100.00	
2	***PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN***	**156,340,190.00**	
2.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		
a.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	156,340,190.00	
3	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA***	**1,267,768,424.00**	
3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		
a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,267,768,424.00	
	TOTAL BELANJA	**18,211,900,979.00**	

Sawahlunto, Januari 2021
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sawahlunto

ADRIYUSMAN, S.Sos, MM
NIP. 19700812 199003 1 003

RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2021

NO	SASARAN		RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN			SATUAN	PENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR				URAIAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA		
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Terlayani Informasi Kebencanaan	70%	1 Program Penanggulangan Bencana						
				1 Pelayanan Informasi Rawan Becana Kab/Kota	1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kab/Kota	1	Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp.	70,530,150.00
							2	Output (Keluaran) Dilaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana	Orang	290
							3	Outcome (Hasil) Masyarakat mengetahui wilayah rawan bencana serta penanganannya	Orang	290
		Persentase Masyarakat yang Terlayani Pada Saat Terjadi Bencana	**50%**	2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	1	Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp.	64,197,400.00
							2	Output (Keluaran) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Orang	80
							3	Outcome (Hasil) Peserta memahami tentang pencegahan bencana	Orang	80
					2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	1	Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp.	96,900,000.00
							2	Output (Keluaran) Jumlah sarana prasarana yang tersedia	Bulan	12
							3	Outcome (Hasil) Sarana prasarana kesiapsiagaan yang bertambah	Bulan	12

						2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Input (Masukan)			
									Jumlah Dana	Rp.	174,410,760.00	
								2	Output (Keluaran)			
									Peralatan yang tersedia	Lembar	212	
								3	Outcome (Hasil)			
									Peralatan perlindungan yang memadai	Lembar	212	
						2.4	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	1	Input (Masukan)			
									Jumlah Dana	Rp.	11,408,601,120.00	
								2	Output (Keluaran)			
									Kondisi pasca bencana yang terkendali	Kegiatan	6	
								3	Outcome (Hasil)			
									Situasi setelah bencana terkendali	Kegiatan	6	
		Persentase Fasum yang Tertangani pada saat Pasca Bencana	15%	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	1	Input (Masukan)			
									Jumlah Dana	Rp.	837,811,600.00	
								2	Output (Keluaran)			
									Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Bulan	12	
								3	Outcome (Hasil)			
									Korban bencana dapat dievakuasi secara cepat dan tepat	Bulan	12	
						3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	1	Input (Masukan)			
									Jumlah Dana	Rp	86,964,995.00	
								2	Output (Keluaran)			
									Jumlah logistik yang tersedia	Bulan	12	
								3	Outcome (Hasil)			
									Terbantunya logistik masyarakat yang terdampak bencana	Bulan	12	
2	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlurto	60%	II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							

	Pancasila				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Input (Masukan)		
									Jumlah Dana	Rp	156,340,190.00
								2	Output (Keluaran)		
									Penyusunan program kerja	Bulan	12
								3	Outcome (Hasil)		
									Pekerjaan berjalan sesuai prosedur	Bulan	12
				II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA							
				1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Input (Masukan)		
									Jumlah Dana	Rp	1,267,768,424.00
								2	Output (Keluaran)		
									Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan	Bulan	12
								3	Outcome (Hasil)		
									Kegiatan berjalan dengan lancar dan masyarakat lebih memahami bahaya narkotika serta kehidupan yang damai antar umat	Bulan	12
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik	Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar		IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Input (Masukan)		
									Jumlah Dana	Rp	10,000,000.00
								2	Output (Keluaran)		
									Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Bulan	12

							3	Outcome (Hasil)		
								Tersedianya pakaian dinas lengkap dengan atributnya	Bulan	12
				1.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1	Input (Masukan)		
								Jumlah Dana	Rp	22,500,000.00
							2	Output (Keluaran)		
								Pendidikan dan pelatihan formal yang terlaksana	Bulan	12
							3	Outcome (Hasil)		
								Meningkatnya kapasitas aparatur	Bulan	12
			2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Input (Masukan)		
								Jumlah Dana	Rp	5,402,000.00
							2	Output (Keluaran)		
								Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12
							3	Outcome (Hasil)		
								Terpenuhinya standar penerangan bangunan kantor	Bulan	12
					2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Input (Masukan)		
								Jumlah Dana	Rp	88,271,130.00
							2	Output (Keluaran)		
								Pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	1
							3	Outcome (Hasil)		
								Bertambahnya inventaris kantor	Unit	1
					2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Input (Masukan)		
								Jumlah Dana	Rp	21,740,000.00
							2	Output (Keluaran)		

				3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Input (Masukan)		
									Jumlah Dana	Rp	187,413,360.00
								2	Output (Keluaran)		
									Pembayaran honorarium Caraka pengirimn surat/laporan dinas dan tersedianya materai 3000 dan 6000 setiap bulannya	Bulan	12
								3	Outcome (Hasil)		
									Tersedianya materai dan paket pengiriman dari benda pos	Bulan	12
						3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Input (Masukan)		
									Jumlah Dana	Rp	74,804,000.00
								2	Output (Keluaran)		
									Terfasilitasinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12
								3	Outcome (Hasil)		
									Lancarnya penggunaan telepon, air dan listrik setiap bulan selama satu	Bulan	12
				4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Input (Masukan)		
									Jumlah Dana	Rp	138,663,800.00
								2	Output (Keluaran)		
									Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	Bulan	12
								3	Outcome (Hasil)		
									Kendaraan dinas berfungsi dengan	Bulan	12

			Pembelian LPG	Bulan	12
		3	Outcome (Hasil)		
			Terpenuhinya LPG untuk kantor	Bulan	12
2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Input (Masukan)		
			Jumlah Dana	Rp	33,480,000.00
		2	Output (Keluaran)		
			Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Bulan	12
		3	Outcome (Hasil)		
			Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12
2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Input (Masukan)		
			Jumlah Dana	Rp	2,885,000.00
		2	Output (Keluaran)		
			Tersedianya bahan bacaan media masa	Bulan	12
		3	Outcome (Hasil)		
			Tersedianya referensi informasi dari media masa	Bulan	12
2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Input (Masukan)		
			Jumlah Dana	Rp	121,380,000.00
		2	Output (Keluaran)		
			Pembayaran biaya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan	Bulan	12
		3	Outcome (Hasil)		
			Terpenuhinya rapat keluar kota dan luar provinsi	Bulan	12

					4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Input (Masukan)		
								Jumlah Dana	Rp	42,890,150.00
							2	Output (Keluaran)		
								Jumlah bangunan kantor yang dipelihara	Unit	1
							3	Outcome (Hasil)		
								Terpelihara dan terawatnya bangunan kantor	Unit	1
					4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Input (Masukan)		
								Jumlah Dana	Rp	19,070,000.00
							2	Output (Keluaran)		
								Terperbaikinya peralatan kantor yang rusak	Bulan	12
							3	Outcome (Hasil)		
								Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak	Bulan	12
			5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Input (Masukan)		
								Jumlah Dana	Rp	5,648,400.00
							2	Output (Keluaran)		
								Penyusunan dokumen perencanaan	Bulan	12
							3	Outcome (Hasil)		
								Dokumen perencanaan perangkat daerah	Bulan	12
			6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Input (Masukan)		
								Jumlah Dana	Rp.	3,268,580,100.00
							2	Output (Keluaran)		
								Gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12
							3	Outcome (Hasil)		
								Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12

				7	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp.	5,648,400.00
								2	Output (Keluaran) Penyusunan Buku Profil BKP-PBD	Dokumen	1
								3	Outcome (Hasil) Tersedianya data informasi BKP-PBD	Dokumen	1
Jumlah Anggaran											**18,211,900,979.00**

Sawahlunto, Januari 2021

KEPALA BADAN KESBANGPOL

DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN, S.Sos, MM

NIP. 19700812 199003 1 003